DPRD II Kupang tetapkan lima nama

** Nomeseoh dan Mell Adoe kandas*

** Ketua DPRD Belu diteror penelepon gelap*

Kupang, PK

DPRD II Kupang, Senin (7/12) menetapkan lima nama bakal calon bupati (Bacabup) Kupang periode 1999-2004. Kelimanya adalah Drs. Ibrahim Agustinus Medah (Karo Orta Setwilda NTT), Drs. Matheos Lay (Ketua Bappeda Kupang), Drs. Ruben Funay (Ketua DPRD II Kupang), Drs. Daniel Adoe (Karo Lingkungan Hidup Setwilda NTT) dan Kol (Inf) Paulus Stefanus Lusi Detaq (anggota DPRD I NTT)

Penetapan lima nama itu berlangsung dalam Sidang Paripurna Khusus DPRD II Kupang yang dipimpin Ketua DPRD Drs. Ruben Funay bersama dua Wakil Ketua, Letkol (Inf) Selo Haryitno dan Nathanael Ratu, BSc. Turut hadir Bupati Kupang Paul Lawa Rihi dan Ny. Cory Lawa Rihi, Sekwilda Barnabas nDjurumana, S.H., Kajari Kupang Yos Syukur Gande, S.H. serta undangan lainnya.

I.A Medah mendapat dukungan dua fraksi yakni FABRI dan Fraksi Karya Pembangunan (FKP). Sedangkan dua kandidat yang sebelumnya masuk nominasi yaitu Drs. Mell Adoe (Ketua komisi A DPRD I NTT) dan Drs. N Nomeseoh (Kakansosopol Kupang) tidak disebutkan ketiga fraksi di DPRD II Kupang.

Saat fraksi membacakan nama bacabup, suasana tampak tegang. FABRI dengan juru bicara Kapten (Pol) Thobias Iku mendapat kesempatan pertama membacakan dua nama calon yaitu Kol (Inf) Paul Detaq dan Drs. I.A Medah, menyusul FPDI yang dibacakan Ketuanya Jonas Panie, menyebut nama Drs. Matheos Lay dan Drs. Daniel Adoe sedangkan FKP dengan juru bicara Barnabas N. Tacoy menyebut Medah dan Drs. Ruben Funay.

Usai pengajuan nama oleh fraksi dilanjutkan dengan penetapan lima nama bacabup Kupang melalui Surat Keputusan DPRD II Kupang No. 02/KHS/DPRD/12/1997 yang ditandatangani ketua fraksi dan pimpinan Dewan dengan tembusan Mendagri, Gubernur NTT dan Bupati Kupang. Dalam sambutannya Bupati Paul Lawa Rihi mengharapkan figur yang tidak masuk lima nama agar bersikap ksatria dan tidak perlu melakukan protes atau demonstrasi.

Hari ini Bupati TTS dilantik

Menurut rencana, hari ini, Selasa (8/12), Gubernur NTT Piet A. Tallo, S.H. atas nama Mendagri melantik dan mengambil sumpah, Willem Nope, S.H. sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II TTS periode 1998-2003 menggantikan Drs. Piet Sabuna pada rapat paripurna istimewa di ruang sidang DPRD II TTS di SoE.

Ketua Panitia Pelantikan Bupati TTS, Th. Langgar, S.H. kemarin menjelaskan, pelantikan akan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di ruang sidang DPRD II TTS. Menurut Langgar, persiapan pelantikan sudah rampung. Undangan yang dikeluarkan sebanyak 1.100 lembar. Pelantikan Nope mestinya berlangsung tanggal 2 Desember 1998. Penundaan itu dilakukan karena adanya kerusuhan di Kupang 30 November silam.

Dari Atambua dilaporkan, masa jabatan Bupati Belu periode 1993-1998, dr. Servatius M. Pareira, MPH yang telah berakhir, Minggu (6/12) diperpanjang lagi selama satu bulan terhitung sejak Senin (7/12) hingga 7 Januari 1999.

Hal tersebut disampaikan Sekwilda Belu, Drs. P.B Letor di ruang kerjanya kemarin. “Jadi jabatan Pak Servas tetap sebagai bupati selama satu bulan sesuai teleks dari Mendagri dan petunjuk Gubernur NTT, bukan Pelaksana Harian (PLH),” kata Letor.

Ketua DPRD II Belu, Drs. Paulus Klau dan Bupati Servas Pareira membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi mengikuti rapat fraksi di DPRD II Belu. Menurut Klau, jabatan Bupati karena berdasarkan teleks Mendagri No 131.63/4111/PUOD tertanggal 2 Desember 1998, Mendagri meminta Gubernur NTT agar menugaskan Servatius M. Pareira, MPH tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Kemudian, petunjuk Gubernur No Pem. X/.131.63/11/98 bahwa pelantikan yang direncanakan sesuai jadwal 6 Desember 1998 akan ditentukan kemudian. Ketua DPRD II Belu, Drs. Paulus Klau yang dikonfirmasi sehubungan dengan tuntutan pemuda Belu baru-baru ini mengatakan, pihaknya sudah meneruskan tuntutan itu kepada Gubernur NTT untuk selanjutnya diserhkan ke Mendagri.

Mengenai tiga nama Cabup yang telah direstui Mendagri, Klau menegaskan, DPRD II Belu tetap konsisten dengan keputusan yang telah ditetapkan yakni, Drs. Marselus Bere, Drs. PB Letor dan dr Servatius M Pareira, MPH. “Seandainya ada perubahan nanti maka perubahannya harus beralasan kuat. Penundaan pemilihan bukan berarti harus berubah,” kata Klau.

Diteror telepon gelap

Ketua DPRD II Belu, Drs. Paulus Klau mengaku beberapa kali diteror penelepon gelap yang menuduhnya telah menerima sogokan sebesar Rp 25 juta agar memilih dr. Servatius Muti Pareira, MPH sebagai Bupati Belu periode 1998-2003.

Pengakuan Klau disampaikan ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/12) seusai memimpin sidang penyampaian perubahan nota keuangan APBD II Belu tahun 1998/1999.

Menurut Klau, dia ditelepon selama berlangsungnya aksi unjukrasa. Si penelepon tidak menyebutkan jati dirinya dan hanya menuduh

telah terima sogok Rp 25 juta. “Dia telepon minta bagian. Lalu saya suruh dia datang saja ke rumah untuk ambil bagiannya,” kata Klau, yang selama aksi unjukrasa mahasiswa menjadi korban hujatan bersama dr. Servas Pareira.

Mengomentari tuduhan tersebut sebagaimana dilansir suatu Harian yang terbit di Dili, Timor Timur, Klau menyatakan semuanya itu tidak benar. Semua itu hanya fitnah dan pihak yang menuduh silakan menunjukan bukti.

Harian yang terbit di Dili melansir berita bahwa Ketua DPRD dan seluruh anggota Dewan telah menerima sogokan Rp 25 juta per suara untuk memenangkan dr. Servas Pareira. Klau juga dituduh dibiayai oleh pengusaha menghadiri pernikahan anak Mendagri di Jakarta. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk membujuk Mendagri agar merestui dr. Servas Pareira.

Klau mengatakan semua tuduhan itu sudah sangat keterlaluan. Dia mmpersilakan pihak yang menuduh itu menunjukkan bukti-bukti kapan ke Jakarta, nginap di mana dan bertemu siapa. “Masa saya ada tenang-tenang di Atambua, orang bisa fitnah yang aneh,” ujar Klau kesal. Sejumlah kalangan di Belu meminta Klau menggugat Harian yang terbit di Dili itu karena telah menyebarkan berita fitnah. “Hal itu dapat dilakukan, apalagi dalam berita itu Klau tidak dikonfirmasi,” kata seorang pengamat hukum.

Bisa berubah

Sementara itu, lima nama Bacabup yang dihasilkan dalam sidang paripurna DPRD II Ende dan Kupang, bisa saja berubah, sebelum ada penetapan dari pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD setempat. “Lima nama Bacabup yang dihasilkan bisa berubah, sebelum ditetapkan pimpinan Dewan dan fraksi,” ujar Asisten I Setwilda NTT, Drs. Th. M. Hermanus di Kupang, Senin (7/12).

Mekanismenya lanjut Hermanus, lima Bacabup harus mempresentasikan program kerja masing-masing. Bilamana, dalam pemaparan program kerja itu, ada figur yang dinilai Dewan tidak relevan, maka Dewan bisa mengganti dengan figur lain.

Ditegaskan, hanya lima nama Bacabup yang ditetapkan pimpinan Dewan bersama fraksi yang selanjutnya diajukan ke Mendagri melalui Gubernur NTT. Jadi, lima nama yang dihasilkan itu sangat mungkin berubah, sepanjang belum mendapat penetapan pimpinan Dewan dan fraksi. Hermanus mencontohkan, lima Bacabup Belu yang dihasilkan, namun pada salah satu figur meninggal dunia. Posisi figur itu digantikan figur lain. Prinsipnya, lima nama Bacabup dapat dikatakan sah apabila telah ditetapkan pimpinan Dewan dan fraksi.

Mengenai jadwal pemilihan Cabup Belu, Hermanus menjelaskan, belum ada waktu yang pasti karena adanya kelompok pro dan kontra

yang bersitegang. Akibat kondisi itu, Dewan memutuskan jadwal pemilihan ditunda, guna menghindari terjadinya bentrok fisik dua kelompok itu. Prinsipnya, kata Hermanus, Pemda NTT tetap melaksanakan keputusan Mendagri yang telah menurunkan tiga nama untuk dipilih DPRD II Belu. ***(fen/ely/tia/pel/ady/ery)***